BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan beberapa penelitan yang sudah diteliti sebelumnya oleh beberapa peneliti sebagai referensi untuk membantu dalam menentukan teori atau konsep, metode dan lainnya. Selain itu, berdasarkan penelitian terdahulu yang telah ditemukan, peneliti juga akan mengevaluasi kekurangan dari penelitian tersebut dan menjadikannya sebagai kelebihan dalam penelitian ini. Peneliti memilih beberapa jurnal yang dianggap sesuai dengan penelitian ini.

Pertama peneliti menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Dolors Palau Sampio yang merupakan profesor dari Departemen Teori Bahasa dan Ilmu Komunikasi dari Universitas Valencia, Spanyo pada 2018. Judul penelitian yang dilakukannya adalah Fact Checking and Scrutiny of Power: Supervision of Public Discourses in New Media Platform from Latin America atau dalam Bahasa Indonesia menjadi Pemeriksaan Fakta dan Pengawasan Kekuasaan: Pengawasan Wacana Publik di Platform Media Baru di Amerika Latin.

Penelitian tersebut menganalisis sembilan proyek di sebagian negara Amerika Latin yang ada sejak 2010 yaitu, *Chequeado, Detector de Mentiras, UYCheck, Truco, El Sabueso, Con pruebas, Aos Fatos, Agencia Lupa, dan Colombia Check.*Penelitian ini ingin membandingkan metodologi kerja dan model evaluasi yang

disajikan oleh *platform* digital serta topik dan aktor yang perlu diperiksa. Dari penelitian ini Dolors bertujuan untuk menganalisis proyek-proyek pemeriksaan fakta alternatif yang telah diluncurkan di Amerika Latin dalam beberapa waktu terakhir dan memahami kontribusi mereka terhadap pluralitas dan keragaman dalam debat publik lokal. Dolors menggabungkan dua metode untuk mencapai tujuan tersebut, kualitatif dan kuantitatif. Dua metode penelitian tersebut diharapkan dapat mengetahui bagaimana pemeriksa fakta memilih, memproses, dan menilai klaim publik.

Penelitian ini mengungkapkan terdapat perbedaan yang signifikan ketika melakukan verifikasi dan menyajikan hasilnya, dengan opsi untuk peningkatan jumlah sumber, keterlibatan suara ahli dan sumber daya audiovisual, atau interaksi dengan pembaca. Selain itu, proses pemerikasaan fakta melibatkan enam hingga delapan langkah. Dari sembilan proyek yang diteliti ditemukan pula bahwa mereka masing-masing menerapkan jenis artikel pemeriksaan fakta yang berbeda-beda. Sebanyak empat proyek menyajikan artikel berjenis *explanatory* atau artikel penjelasan yang menampilkan informasi kontekstual dan proses penalaran. Dua proyek hadir dengan artikel berjenis *concise* atau artikel yang menampilkan penjelasan singkat dari putusan. Sisanya, tiga proyek menggabungkan kedua jenis tersebut. Karena dari sembilan proyek tersebut memiliki kategorisasi penilaian yang berbeda-beda, maka Dolors mengelompokkannya menjadi enam, yaitu benar, hampir benar, tidak terbatas, hampir salah, salah, dan tidak dapat dinilai.

Ditemukan pula proyek pemeriksaan fakta lebih fokus pada topik hangat yang terjadi di dunia politik, khususnya informasi yang memengaruhi masyarakat seperti kebijakan sosial. Mereka lebih banyak menggunakan tiga atau lebih sumber untuk

memeriksa klaim, sedangkan yang lain hanya menggunakan dua sumber atau kurang dari itu untuk memeriksa klaim. Ditemukan pula adanya elemen audiovisual yang digunakan sebagai sarana untuk menjelaskan prosedur pemeriksaan fakta. Ada juga yang menggunakan grafik sebagai pendukung. Namun ada juga yang tidak menggunakan audiovisual dan grafik sama sekali. Video jarang digunakan untuk memaparkan kesimpulan dan persentasenya hanya di bawah 4% dalam pemerikasaan fakta. Tiga dari proyek yang diteliti menonaktifkan kolom komentarnya.

Peneliti merasa bahwa penelitian yang dilakukan oleh Dolors sesuai dengan penelitian ini. Peneliti menjadi yakin bahwa metode atau kebijakan setiap organisasi berbeda dalam melakukan pemeriksaan fakta. Selain itu Dolors juga menyoroti penggunaan berbagai elemen dalam pemeriksaan fakta selain teks yang lazim dilakukan oleh media *online* saat ini. Namun penelitian Dolors terlalu luas karena tidak fokus pada satu media dan format tertentu saja. Selain itu, penelitian Dolors kurang mendalam karena hanya membandingkan antara sembilan proyek yang dipilihnya sehingga peneliti memilih untuk fokus kepada salah satu media saja yaitu *Tempo.co*. Peneliti juga akan membahas format video pada penyajian pemeriksaan fakta yang dilakukan karena pada penelitian Dolors ditemukan bahwa video jarang digunakan oleh para pemeriksa fakta untuk membuktikan klaim.

Peneliti menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Petter Bae Brandtzaeg dan Asbjorn Folstad pada 2017 yang berjudul *Trust and Distrust in Online Fact-Checking Services* atau dalam Bahasa Indonesia menjadi Kepercayaan dan Ketidakpercayaan dalam Pemeriksaan Fakta *Online*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegiatan pemeriksaan fakta yang banyak tidak memperhatikan pandangan

masyarakat umum tentang layanan pemeriksaan fakta. Penelitian mengenai pemeriksaan fakta biasanya hanya berfokus pada bagaimana keyakinan dan sikap orang berubah dalam menanggapi fakta yang bertentangan dengan pendapat mereka sendiri yang sudah ada sebelumnya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan layanan pemeriksaan fakta tergantung pada asal dan kepemilikan yang dapat memengaruhi persepsi integritas dan transparansi dari proses pemeriksaan fakta sehingga kedua peneliti tersebut ingin mengetahui bagaimana pengguna media sosial memandang kepercayaan dan kegunaan dari layanan pemeriksaan fakta. Penelitian ini hanya fokus pada tiga layanan pemeriksaan fakta, yaitu *Snopes, FactCheck.org*, dan *StopFake*. Ketiganya dipilih karena cukup popular di kalangan masyarakat dan menyajikan pemeriksaan fakta melalui situs web mereka sendiri serta melalui *Facebook* dan *Twitter*.

Kedua peneliti tersebut mengumpulkan data menggunakan *Meltwater Buzz*, layanan pemantauan media sosial, menggunakan kuesioner untuk mengetahui interaksi yang terjadi di media sosial, mengumpulkan pendapat mengenai persepsi pengguna media sosial, kemudian menganalisis konten untuk mengidentifikasi dan menyelidiki pola terkait persepsi tentang kegunaan layanan pemeriksa fakta.

Peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Mayer untuk mengkategorisasikan kepercayaan, yaitu berdasarkan kemampuan (sejauh mana layanan dianggap memiliki keterampilan yang dibutuhkan), kebajikan (sejauh mana layanan dianggap sebagai niat untuk berbuat baik), dan integritas (sejauh mana layanan dipandang mematuhi prinsip independen, tidak memihak, dan adil).

Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa mayoritas unggahan *Snopes* dan *FactChecking.org* menyajikan hal-hal yang bersifat negatif yang biasanya berkaitan dengan kepercayaan, kemampuan, dan kebijakan dari layanan tersebut. Kurangnya kepercayaan menjadi penghambat layanan pemeriksaan fakta untuk menjangkau pengguna media sosial. Sedangkan unggahan di *StopFake* mencerminkan sifat positif biasanya terkait kegunaannya. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa adanya peningkatan permintaan untuk layanan pemeriksaan fakta.

Penelitian tersebut tidak memperdalam masing-masing layanan pemeriksaan fakta dan hanya melihat dampak yang ditimbulkan dari hasil pemeriksaan fakta mereka. Penelitian tersebut juga tidak menjabarkan konfirmasi dari ketiga layanan pemeriksaan yang dipilihnya sehingga hanya terlihat dari sisi khalayak saja. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data dan informasi dari media yang melakukan pemeriksaan fakta serta tergabung menjadi anggota IFCN, yaitu *Tempo.co*. Hal ini berdasarkan hasil penelitian tersebut yang menyatakan bahwa sebagian khalayak butuh adanya transparansi dari layanan pemeriksa fakta untuk meningkatkan kepercayaan. Transparansi menjadi salah satu syarat yang ditetapkan oleh IFCN dalam *code of principles* yang di mana Tempo.co juga terdaftar dalam IFCN.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

	Penelitian I	Penelitian II	Penelitian III
Nama Peneliti	Dolors Palau Sampio	Petter Bae	Marvela
		Brandtzaeg dan	
		Asbjorn Folstad	
	Fact Checking and	Trust and Distrust in	Multimedia
	Scrutiny of Power:	Online Fact-	Journalism dalam
Judul	Supervision of	Checking Services	Fact Checking:
Penelitian	Public Discourses in		Studi Kasus pada
	New Media Platform		Kanal Cek Fakta di
	from Latin America		Тетро.Со
	Menganalisis	Mengetahui	Mengetahui
	proyek-proyek	bagaimana pengguna	penerapan prinsip-
	pemeriksaan fakta	media sosial	prinsip kategorisasi
	alternatif yang telah	memandang	dan alur kerja
	diluncurkan di	kepercayaan dan	multimedia
Tujuan	Amerika Latin	kegunaan dari	journalism pada
Penelitian	dalam beberapa	layanan pemeriksaan	kanal Cek Fakta
	waktu terakhir dan	fakta yaitu Snopes,	Tempo.co dalam
	memahami	FactCheck.org, dan	melakukan
	kontribusi mereka	StopFake.	pemeriksaan fakta
	terhadap pluralitas		
	dan keragaman		

	dalam debat publik		
	lokal.		
Metode	Kualitatif dan	Kualitatif dan	Kualitatif
Penelitian	kuantitatif	kuantitatif	
	Proyek pemeriksaan	Kepercayaan	
	fakta lebih fokus	layanan pemeriksaan	
	pada topik hangat	fakta tergantung	
	yang terjadi di dunia	pada asal dan	
	politik. Mereka lebih	kepemilikan yang	
	banyak	dapat memengaruhi	
	menggunakan tiga	persepsi integritas	
Hasil	atau lebih sumber	dan transparansi dari	
Penelitian	untuk memeriksa	proses pemeriksaan	
	klaim. Penggunaan	fakta. Kurangnya	
	elemen audiovisual	kepercayaan menjadi	
	yang digunakan	penghambat layanan	
	sebagai sarana untuk	pemeriksaan fakta	
	menjelaskan	untuk menjangkau	
	prosedur	pengguna media	
	pemeriksaan fakta.	sosial.	

2.2 Konsep dan Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori dan konsep sebagai pendukung. Berikut adalah teori dan konsep yang digunakan oleh peneliti.

2.2.1 Kekacauan Informasi: Misinformasi, Disinformasi, dan Malinformasi

Banyaknya istilah yang digunakan berbagai pihak mengenai kesalahan informasi seperti salah satunya yang terkenal adalah berita palsu, membuat beberapa pihak memanfaatkannya sebagai senjata untuk menyerang industri berita sebagai cara melemahkan liputan yang tidak disukai penguasa (UNESCO, 2019, p. 52). Atas dasar tersebut, penggunaan istilah kekacauan informasi yang dibedakan menjadi tiga kategori, misinformasi, disinformasi, dan malinformasi lebih disarankan. Ini berbeda dengan istilah berita palsu yang menggabungkan antara misinformasi dengan disinformasi (UNESCO, 2019, p. 53).

Misinformasi adalah informasi salah yang disebarkan oleh orang yang mempercayainya sebagai hal yang benar. Sedangkan, disinformasi adalah informasi salah yang disebarkan oleh orang yang tahu bahwa informasi tersebut salah. Disinformasi dapat diartikan sebagai kebohongan yang disengaja dan berkenaan dengan orang-orang yang disesatkan secara aktif oleh aktor jahat. Malinformasi merupakan informasi yang berdasarkan realitas tetapi digunakan untuk merugikan orang, organisasi, atau negara lain (UNESCO, 2019, p. 53).

Ketiga kategori tersebut memiliki konsekuensi yang mirip terhadap lingkungan dan masyarakat karena dapat merusak integritas proses demokrasi. Ada pula kasus-kasus tertentu yang merupakan kombinasi dari ketiga kategori tersebut. Namun yang dapat dipastikan ketiganya memiliki sebab, teknik, dan solusi yang

berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing kategori (UNESCO, 2019, p. 53).

Berdasarkan tiga kategori tersebut, ditemukan adanya tujuh tipe konten turunan dari misinformasi dan disinformasi (UNESCO, 2019, p. 56):

- Satire dan parodi, menampilkan konten sindiran walaupun dapat dianggap sebagai bentuk seni. Namun dapat membuat orang bingung memahami isi konten tersebut.
- 2. Hubungan yang salah, terjadi ketika judul berita, visual, atau keterangan tidak mendukung konten yang bersangkutan. Yang paling sering terjadi adalah judul berita *click bait*. Hal tersebut dilakukan karena adanya persaingan yang ketat untuk mendapatkan perhatian dari khalayak, sehingga judul harus dibuat semenarik mungkin agar diklik walaupun pembaca dapat saja merasa tertipu dengan isi beritanya.
- 3. Konten yang menyesatkan, terjadi ketika adanya penggunaan informasi menyesatkan untuk membingkai isu atau individu dengan cara tertentu, seperti memotong foto atau memilih kutipan secara selektif.
- 4. Konteks yang salah, terjadi ketika konten asli digunakan untuk konteks lain, di luar konteks asli.
- 5. Konten tiruan, diakibatkan tidak adanya nama jurnalis di bawah artikel atau logo organisasi yang digunakan dalam video atau gambar sehingga menimbulkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab menggunakan konten tersebut untuk tujuan lain.
- 6. Konten yang dimanipulasi, ketika konten asli dimanipulasi untuk menipu.

7. Konten rekaan, dapat terjadi pada format teks dan visual yang sengaja dibuat untuk tujuan tertentu tanpa didukung fakta dan bukti yang jelas.

Adapun konsekuensi yang ditimbulkan oleh kekacauan informasi bagi jurnalisme dan industri berita (UNESCO, 2019, p. 74):

- Berkurangnya kepercayaan terhadap organisasi berita dan jurnalis yang membagikan informasi yang tidak akurat, palsu, atau menyesatkan.
- 2. Membaurnya laporan berkualitas dengan disinformasi dan iklan yang mirip berita namun tidak disebutkan sebagai iklan, sehingga meningkatkan ketidakpercayaan secara umum.
- 3. Model bisnis jurnalisme juga menjadi terganggu. Khalayak dapat beralih ke media lain ketika kepercayaannya mulai berkurang.
- 4. Melemahnya peran jurnalis sebagai agen dalam akuntabilitas yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat.
- Penutupan media, penghentian layanan internet, pemblokiran lama atau aplikasi serta penyensoran yang dapat melemahkan kebebasan pers dan berekspresi.
- Penyerangan terhadap jurnalis khususnya perempuan oleh pelaku disinformasi yang memanfaatkan pelecehan daring untuk menyudutkann liputan kritis.

2.2.2 Multimedia Journalism

Kegiatan jurnalisme dikategorikan ke dalam beberapa hal, seperti journalisme multimedia, jurnalisme hiburan, jurnalisme sastra, jurnalisme

kuning, dan masih banyak lagi. Namun yang paling penting adalah *multimedia journalism* karena mampu memengaruhi masa depan suatu negara termasuk Indonesia (Ramadhani, 2019, p. 48). Hal ini karena *multimedia journalism* dibutuhkan untuk mendistribusikan konten atau laporan berita melalui berbagai *platform* media. Sebagai media *online* di era saat ini, jurnalis juga dituntut untuk mampu menerapkan *multimedia journalism*, seperti di bawah ini (Wendratama, 2017, p. 6):

- Jurnalis harus dapat menggunakan berbagai alat multimedia untuk penyampaian cerita, seperti tautan ke situs lain untuk menambahkan fakta tertait, penggunaan foto, video, infografik, peta interaktif, dan animasi GIF sederhana.
- 2. Penulisan teks disajikan lebih efisien (singkat dan padat makna) dan boleh menggunakan bahasa informal. Hal ini dilakukan supaya khalayak dapat lebih mudah mengerti dan tulisan lebih ringkas daripada media cetak tetapi lebih panjang daripada radio dan televisi.
- Jurnalis bekerja lebih cepat walaupun kecepatan bukanlah segalanya.
 Setiap media memiliki kebijakannya masing-masing dalam menerbitkan berita, misalnya 10 menit sekali atau ditentukan 15 berita per harinya.

Mark Deuze mendefinisikan ke dalam dua bentuk. Pertama *multimedia journalism* sebagai tampilan dari paket berita di situs *web* yang menggunakan dua atau lebih format, seperti teks, audio, gambar bergerak atau diam, grafis, serta elemen interaktif dan hipertekstual. Kedua, *multimedia journalism* merupakan perpaduan tampilan paket berita melalui berbagai media, seperti situs *web*, *newsgroup*, *email*, SMS, MMS, radio, televisi, koran, dan majalah

(Deuze, 2004, p. 140). Pada definisi pertama lebih merujuk kepada media online, sedangkan definisi kedua mengarah pada sistem pemasaran konten melalui berbagai media. Menurut McAdams (dalam Kurniawati, 2013, p. 1) multimedia journalism dikenal sejak awal tahun 2000-an di mana saat itu Associated Press, kantor berita yang berada di New York mengemas berita bencara dalam bentuk audio-photo slide show.

Dalam menerapkan *multimedia journalism* terdapat beberapa alat yang dapat digunakan untuk menyimpan informasi, yaitu teks, foto, *slideshow*, video, *timeline*, infografik, peta, animasi, tautan, dan *Google AutoDraw* (Wendratama, 2017, p. 77). Multimedia berarti penggunaan lebih dari satu teknik (teks, audio, foto, gambar bergerak) untuk menceritakan satu cerita. Maka, pada berita-berita multimedia menggunakan dua atau lebih media untuk bercerita (Thornburg, 2011, p. 8). Video *online* idealnya berdurasi maksimal dua menit dan merangkum hal-hal paling penting bernilai berita (Wendratama, 2017, p. 84). Namun durasi tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan, yang terpenting data yang ditampilkan harus kuat. Dalam video *online* memerlukan beberapa pendukung berupa gambar bergerak atau tidak bergerak, teks sebagai narasi, dan suara termasuk latar musik serta tidak lupa untuk mencantumkan sumber.

Gambar bergerak atau tidak bergerak dapat diolah secara kreatif menjadi infografik. Secara sederhana infografik dapat diartikan sebagai visualisasi data atau informasi dengan menggunakan tabel, grafik, gambar, dan unsur visual apa pun (Wendratama, 2017, p. 89). Pada setiap gambar perlu juga dilengkapi dengan teks untuk memudahkan pemahaman khalayak terhadap informasi

yang mau diberikan. Bahkan, jika gambar kurang bercerita, teks yang padat dan informatif merupakan senjata yang kuat (Wendratama, 2017, p. 85).

Teks dapat dimanfaatkan untuk memuat informasi hasil observasi, kutipan langsung dari narasumber, ataupun parafrasa kutipan. Bentuk penulisannya juga beragam, dapat di bagian atas atau bawah layar, dapat menggunakan huruf kapital pada setiap huruf untuk memudahkan khalayak dalam membaca, serta penggunaan warna, namun disarankan warna yang digunakan maksimal dua, untuk teks dalam satu gambar (Wendratama, 2017, p. 85). Maraknya media yang memanfaatkan penggunaan video dalam menyampaikan informasi mendalam dan investigatif, mereka melibatkan reporter untuk tampil di dalam video seperti yang dilakukan di televisi.

Suara dan latar musik yang digunakan, dapat mengunduhnya dari internet dengan tetap memperhatikan hak cipta. Untuk latar musik disarankan untuk menggunakan musik instrumental karena dengan adanya lirik lagu dapat mengganggu fokus pembaca pada teks (Wendratama, 2017, p. 86).

Dalam multimedia, jurnalis memiliki beragam pilihan tentang bagaimana menggabungkan teknik *storytelling* untuk menceritakan berbagai elemen dari satu cerita (Thornburg, 2011, p. 8). Berbagai bentuk multimedia yang diterapkan, inti dari jurnalisme tetap *storytelling* (Dunham, 2019, p. 15). *Storytelling* sangat penting, namun di era multimedia saat ini jurnalis tidak hanya mengandalkan teks tetapi juga visual (Dunham, 2019, p. 15).

Dalam penerapan *multimedia journalism*, terdapat beberapa prinsip kategorisasi yang dapat dipilih oleh jurnalis untuk digunakan dalam penyajian berita (Thornburg, 2011, p. 14):

- Audio atau video yang disiarkan secara langsung. Tujuannya untuk menyampaikan informasi di saat kejadian itu tengah berlangsung. Biasanya digunakan untuk meliput peristiwa penting yang terjadi di saat banyak orang sedang bekerja atau beraktivitas sehingga tidak dapat menyaksikan siaran dari televisi maupun radio. Beberapa media online juga akan tetap menyiarkan siaran langsung di situs mereka walaupun tidak banyak penontonnya.
- 2. Audio atau video yang diarsipkan. Organisasi berita mengunggah audio atau video yang sudah direkam sebelumnya. Materi mungkin telah direkam beberapa jam sebelumnya, atau mungkin bertahuntahun sebelumnya, atau mungkin bertahun-tahun sebelumnya.
- 3. *Feature Story*. Sama seperti di media cetak, sebuah cerita fitur dalam berita audio dan video cenderung panjang. *Feature story* biasanya disebut dengan documenter karena memberi khalayak kesempatan untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahami suatu masalah. *Feature story* juga berusaha membangkitkan emosi dari khalayak dengan tidak lupa nilai berita khususnya 5W+1H.
- 4. *Podcast* atau *vodcast*. *Podcast* dan *vodcast* adalah serangkaian presentasi yang direkam yang dapat diakses khalayak. Setiap

- episodenya berurutan sesuai dengan benang merah yang menghubungkan masing-masing episode.
- Galeri foto. Menyimpan koleksi foto yang bercerita. Setiap foto dipisahkan ke dalam kategori berbeda dan mencantumkan keterangan.
- 6. Gambar animasi. Dapat digunakan untuk menjelaskan proses atau menunjukan peta sebagai bagian multimedia. Gambar animasi juga dapat berguna bagi khalayak untuk mengontrol sendiri informasi yang diterima.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan konsep pertama yang dipaparkan oleh Mark Deuze, di mana *multimedia journalism* yang didefinisikan sebagai tampilan dari paket berita di situs *web* yang menggunakan dua atau lebih format. Namun dari temuan yang peneliti, mayoritas media *online* yang melakukan pemeriksaan fakta menggunakan dengan minimal persyaratan konsep *multimedia journalism*. Media lebih banyak hanya menggunakan teks dan gambar pada hasil pemeriksaan faktanya. Masih sedikit media *online* yang menggunakan lebih dari dua format dalam pemberitaan pemeriksa fakta.

Multimedia journalism membantu untuk menjelaskan cerita yang lebih dalam. Ada beragam bentuk multimedia journalism yang digunakan saat ini dan semakin bertambah, berikut adalah beberapa yang paling berguna bagi orang yang memasuki profesi berita terkini, yaitu kolom komentar, feature story, blog, fotografi, tayangan slide dan galeri foto, tayangan slide dengan suara, GIF, audio, video, grafik internasional, grafik interaktif, termasuk

visualisasi data, grafik animasi, *virtual reality storytelling*, dan kecerdasan buatan (Dunham, 2019, p. 13).

Sejumlah manfaat dari *multimedia journalism* (Dunham, 2019, p. 14):

- 1. Multimedia membantu untuk bercerita
- 2. Multimedia dapat menambah kedalaman dan wawasan terkait isu tertentu
- Multimedia dapat menceritakan kisah lebih baik daripada hanya menggunakan teks
- 4. Beberapa elemen media menambahkan suara atau foto narasumber untuk memungkinkan pembaca berinteraksi dengan cerita
- 5. Galeri foto dapat melengkapi atau menggantikan cerita yang dicetak
- 6. *Slideshows* disajikan dengan kombinasi suara visual dan audio storytelling
- 7. Podcast mengeksplorasi subjek secara detail
- 8. Video menunjukkan, bukan memberi tahu
- 9. Peta interaktif memberikan lokasi secara detail
- 10. Grafik animasi atau interaktif menjelaskan konsep rumit secara terperinci
- Visualisasi data memungkinkan khalayak untuk berinteraksi dengan informasi dan menemukan cerita mereka sendiri dalam data yang ada
- Multimedia meningkatkan kredibilitas dengan menyediakan bahan dokumen pendukung

Berbagai bentuk multimedia yang diterapkan, inti dari jurnalisme tetap *storytelling* (Dunham, 2019, p. 15). *Storytelling* sangat penting, namun di era multimedia saat ini jurnalis tidak hanya mengandalkan teks tetapi juga visual (Dunham, 2019, p. 15).

Kerangka kerja yang membentuk alur kerja dalam pengembangan paket berita digital sangat banyak meminjam dari pembuatan film dan didasarkan pada tiga tahap umum (Rue & Hernandez, 2016, p. 184). Dimulai dengan pra-produksi yang terkadang disebut sebagai fase perencanaan, lalu bergeser ke fase produksi yang merupakan tempat konten cerita dikumpulkan, dan fase terakhir adalah pasca produksi, di mana pengeditan konten dan desain platform akhir berlangsung (Rue & Hernandez, 2016, p. 184).

Pada tahap pertama, pra-produksi jurnalis terlebih dulu menentukan format berita yang akan disajikan, *multimedia journalism* atau bukan. Para jurnalis berdiskusi untuk mengembangkan ide kreatif, menentukan pendekatan interaktif seperti apa yang sesuai dan menentukan alat-alat yang akan digunakan. Bagi jurnalis, menentukan audiens dan *platform* juga menjadi penting pada tahap pra-produksi. Pada tahap produksi, jurnalis akan turun ke lapangan mencari informasi yang sesuai dengan perencanaan di tahap sebelumnya. Jurnalis disarankan untuk berdiskusi kembali dan mengevaluasi hasil temuan di lapangan dan melakukan revisi jika diperlukan. Pada tahap pasca produksi, jurnalis akan mulai merancang naskah berdasarkan informasi yang sudah disepakati di tahap sebelumnya, dilanjutkan dengan perancangan desain dan hasil prototipe yang nantinya akan melewati proses pengujian, evaluasi, dan revisi sebelum akhirnya dipublikasikan

(Rue & Hernandez, 2016, p. 185). Alur kerja umum *multimedia journalism* ditampilkan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Alur kerja umum *multimedia journalism*

Pra-produksi	Produksi	Pasca produksi
Menentukan format	Pekerjaan di lapangan	Pembuatan naskah
Mengembangkan ide	Berdiskusi	Merancang desain
kreatif		
Pemilihan alat	Evaluasi	Prototipe
Mencari inspiratif	Revisi	Pengujian
Menentukan audiens		Evaluasi
Platform		Revisi
		Dipublikasikan

Sumber: Olahan penulis, 2020

Biasanya, pasca-produksi membutuhkan waktu lebih lama daripada pengumpulan konten yang sebenarnya, oleh karena itu, penting untuk menyisakan waktu yang cukup untuk mengedit elemen multimedia dan meletakkan kesesuaian dan penyelesaian pada desain yang diinginkan. Untuk mempercepat proses ini, beberapa organisasi yang lebih besar telah membuat alur format agar konten dapat dikemas dan diterbitkan secara lebih tepat waktu, tetapi mereka masih mengikuti tiga alur kerja tersebut (Rue & Hernandez, 2016, p. 184).

2.2.3 Fact Checking

Media *online* melakukan *fact checking* atau pemeriksaan fakta untuk memerangi bertambahnya kekacauan informasi karena adanya pengaruh yang dapat didapat akibat kekacauan informasi terhadap keberlangsungan praktik *online jurnalism*. Secara tradisional istilah *fact checking* atau pemeriksaan fakta dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh redaksi untuk

mengoreksi dan memverifikasi klaim faktual yang dibuat oleh reporter dalam artikelnya (UNESCO, 2019, p. 98). Dalam melakukan pemeriksaan fakta, redaksi menilai soliditas liputan, memeriksa ulang fakta dan angka, serta bertujuan untuk mengontrol kualitas dari konten media berita sebelum diterbitkan.

Namun kini pemeriksaan fakta juga berfokus pada klaim yang telah diterbitkan dan dikonsumsi publik. Hal tersebut disebut dengan pemeriksaan fakta *ex post* yang bertujuan untuk membuat para politikus dan tokoh publik lain bertanggung jawab dengan kebenaran pernyataan mereka (UNESCO, 2019, p. 99). Dengan adanya pemeriksaan fakta, suatu klaim dapat mendapatkan konfirmasi dari pihak yang bersangkutan untuk memperkuat atau sebaliknya, membantah klaim tersebut.

Awalnya, pemeriksaan fakta *ex post* muncul dengan kehadiran *Factcheck.org* dan *Factcheck Channel 4* yang hanya mengutamakan pada bidang politik, seperti iklan politik, pidato kampanye, dan manifesto partai. *Factcheck.org* merupakan proyek yang dibentuk oleh Pusat Kebijakan Publik Annenberg di Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat pada 2003 sedangkan *Factcheck Channel 4* diluncurkan pada 2005 (UNESCO, 2019, p. 99).

Secara umum, menurut Alexios Mantzarlis (dalam UNESCO, 2019, p. 101) pemeriksaan fakta terdiri dari tiga fase:

 Menemukan klaim yang faktanya dapat diperiksa dengan menjelajahi catatan legislatif, media berita, dan media sosial. Proses ini termasuk menentukan mana klaim yang faktanya dapat diperiksa dan yang faktanya harus diperiksa. Pemeriksa fakta fokus pada klaim yang memuat minimal satu fakta yang dapat diverifikasi kebenarannya secara objektif, namun pemeriksa fakta tidak dapat menilai kebenaran opini, prediksi, hiperbola, satir, dan guyonan (UNESCO, 2019, p. 107).

- 2. Menemukan fakta yang relevan dengan mencari bukti terbaik yang tersedia terkait klaim tersebut. Pemeriksa fakta mengevaluasi sumbersumber yang mereka temukan berdasarkan enam kriteria, yaitu kedekatan (kedekatan bukti dengan klaim), keahlian (kualifikasi apa saja yang menandakan kualitas orang yang menyajikan bukti), komitmen validitas (cara bukti yang dikumpulkan), transparansi (informasi lengkap mengenai sumber), reliabilitas (rekam jejak bukti untuk dievaluasi), dan konflik kepentingan (bukti menunjukkan kepentingan pribadi atau privasi sumber (UNESCO, 2019, p. 110).
- 3. Mengoreksi catatan yang ada dengan mengevaluasi klaim itu berdasarkan bukti, biasanya dengan skala kebenaran. Berdasarkan PolitiFact ada lima skala yang digunakan, yaitu akurat (pernyataan akurat), sebagian besar benar (pernyataan akurat namun butuh klarifikasi atau informasi tambahan), setengah benar (pernyataan Sebagian akurat tapi informasi penting tidak dicantumkan), sebagian besar salah (pernyataan berisi beberapa informasi yang benar namun mengabaikan fakta yang penting sehingga memberikan arti yang berbeda), salah (penyataan tidak akurat), dan kebohongan besar (pernyataan tidak akurat dan disajikan dengan konyol) (UNESCO, 2019, p. 111).

2.2.3.1 Code of Principles International Fact Checking Network

The International Fact Checking Network (IFCN) telah mengembangkan seperangkat prinsip yang memandu para pemeriksa fakta dalam pekerjaan mereka (UNESCO, 2019, p. 102). Sebelum melakukan pemeriksaan fakta, organisasi perlu untuk mendaftar dan mematuhi prinsip IFCN yang sudah ditentukan. Prinsip-prinsip tersebut dikembangkan dengan tujuan untuk membantu khalayak dalam membedakan pemeriksaan fakta antara yang baik dan buruk (UNESCO, 2019, p. 102).

IFCN merupakan bagian dari *Poynter Institute* yang didedikasikan untuk menyatukan pemeriksa fakta di seluruh dunia. Sejak diluncurkan pada September 2015, IFCN bertujuan untuk mendukung serangkaian inisiatif pemeriksa fakta dengan mempromosikan praktik terbaik dan pertukaran di bidang ini. Berikut adalah *Code of Principles International Fact Checking Network*, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh IFCN yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya yang juga dicantumkan di dalam situs *website* mereka, yaitu:

1. Komitmen terhadap Organisasi

Bagi calon anggota harus dapat memberikan bukti keanggotaannya dalam suatu organisasi resmi, seperti di Indonesia media terdaftar di Dewan Pers. Praktik terbaik yang disarankan adalah organisasi menyiapkan dokumen mengenai sudah resminya terdaftar di mata hukum atau pajak. Namun pada kenyataannya persyaratan ini tidak sepenuhnya dipenuhi oleh media *mainstream*. Perbedaan persepsi menjadi kendala dari pemenuhan

persyaratan ini sehingga IFCN memperbaharui pihak penilai supaya memiliki pemahaman persyaratan yang konsisten untuk setiap organisasi harus menyediakan dokumen pendaftaran resmi.

Calon anggota juga harus menunjukkan hasil pemeriksaan faktanya selama tiga bulan terakhir sebelum bergabung dengan IFCN. Calon anggota akan dinyatakan memenuhi syarat ini jika rata-rata melakukan satu pemeriksaan fakta setiap minggunya dalam tiga bulan terakhir.

2. Komitmen terhadap Non-Partisipan dan Keadilan

Organisasi-organisasi penandatangan cek fakta mengklaim menggunakan standar yang sama untuk setiap cek fakta. Mereka tidak memusatkan pemeriksaan fakta pada satu sisi saja. Mereka mengikuti proses yang sama untuk setiap pemeriksaan fakta dan membiarkan bukti menentukan kesimpulan. Penandatangan tidak mengadvokasi atau mengambil posisi kebijakan tentang masalah yang mereka periksa sehingga bukti-bukti yang telah dikumpulkan harus dicantumkan agar masyarakat tidak berspekulasi mengenai keterlibatan para pemeriksa fakta dalam dunia politik. Selain itu organisasi juga disarankan untuk memberikan penjelasan yang ditulis maksimal 200 kata mengenai cara organisasi berusaha keras mempertahankan standar yang digunakan dalam pemeriksaan fakta. Dalam komitmen ini tidak hanya menyajikan artikel cek fakta namun relevansi juga sangat diperhatikan. Relevansi yang dimaksud adalah pentingnya klaim untuk masyarakat dan keterjangkauan masyarakat.

Berdasarkan laporan evaluasi tahun 2018, IFCN menyatakan praktik terbaik dilakukan ketika organisasi pemeriksaan fakta tidak hanya

menyediakan tautan ke pemeriksaan faktanya dan memberikan penjelasan mengenai cara untuk tetap konsisten tetapi perlu juga mencantumkan tautan informasi lebih rinci mengenai praktik yang dilakukan masingmasing organisasi. Namun berdasarkan hasil pengamatan, beberapa organisasi yang mendaftar hanya memberikan informasi secara umum mengenai pemeriksaan fakta yang mereka lakukan sehingga IFCN mewajibkan kepada seluruh anggotanya untuk menyediakan pernyataan lebih rinci mengenai penjelasan bagaimana mereka berusaha untuk melakukan pemeriksaan fakta tanpa berpihak dengan siapapun.

Beberapa organisasi juga tidak menyatakan dengan jelas bahwa seluruh pemeriksa fakta tidak tergabung dalam partai politik. Mereka hanya menyatakan bahwa organisasinya tidak berpihak kepada siapapun sehingga IFCN memperbaharuinya dengan menegaskan bahwa setiap organisasi harus menjelaskan lebih rinci. Jika organisasi hanya mengulang apa yang dicantumkan dalam perjanjian maka pihak penilai akan mempertimbangkan organisasi tersebut patuh atau tidak.

3. Komitmen terhadap Transparansi Sumber

Penandatangan bercita-cita agar pembacanya dapat memverifikasi temuan sendiri. Penandatangan memberikan semua sumber secara cukup rinci sehingga pembaca dapat meniru pekerjaan mereka, kecuali dalam kasus-kasus di mana keamanan pribadi sumber dapat dikompromikan. Dalam kasus seperti itu, penandatangan memberikan informasi sedetail mungkin. Berupa penjelasan singkat maksimal 500 kata mengenai sumber yang

digunakan oleh pemeriksa fakta sedetail mungkin. Penandatangan juga dapat menyediakan tautan yang relevan di mana sumber tersedia dan dapat diakses secara *online*. Diharapkan pendandatangan juga mengidentifikasi kepentingan dari sumber yang digunakan dalam pemeriksaan fakta karena itu dapat berpengaruh terhadap kepercayaan khalayak mengenai keakuratan sumber yang dipaparkan. Selain itu penandatangan juga perlu memeriksa seluruh elemen kunci klaim terhadap lebih dari satu sumber bukti saja, kecuali jika sumber tersebut adalah satu-satunya yang relevan dengan topik yang dibahas.

Berdasarkan laporan evaluasi tahun 2018, IFCN menyatakan praktik terbaik jika organisasi mengkompilasi sumber yang mereka gunakan di database atau hasil tangkapan layar dari sumber yang disarankan. IFCN menerima berbagai keluhan dari pembaca yang menunjukkan beberapa pemeriksaan fakta tidak mencantumkan atau menautkan sumber yang mereka gunakan. Pencantuman sumber merupakan hal yang penting untuk menelusuri kembali pekerjaan pemeriksaan fakta sehingga IFCN akan menjadikan aturan ini menjadi yang paling mendasar untuk dipatuhi oleh pemeriksa fakta.

4. Komitmen terhadap Transparansi Pendanaan dan Organisasi

Organisasi yang menandatangani transparan tentang sumber pendanaan mereka. Jika mereka menerima dana dari organisasi lain, mereka memastikan bahwa penyandang dana tidak memiliki pengaruh atas kesimpulan yang dicapai oleh pemeriksa fakta dalam laporan mereka.

Organisasi juga harus menjelaskan bagaimana pemeriksaan fakta dilakukan. Organisasi penandatangan merinci latar belakang profesional semua tokoh kunci dalam organisasi dan menjelaskan struktur organisasi dan status hukum. Penandatangan dengan jelas menunjukkan bagaimana cara bagi pembaca untuk berkomunikasi dengan mereka. Selain itu organisasi yang terdaftar juga harus menerbitkan rata-rata minimal satu cek fakta setiap minggunya dalam tiga bulan. Bagi organisasi atau media *online* diharapkan untuk membagikan rincian setiap pendanaannya selama satu tahun terakhir sebesar 5% atau lebih dari total pendapatan, serta gambaran umum dari pengeluaran.

Berdasarkan laporan evaluasi tahun 2018, IFCN menyatakan sebagian besar organisasi independen menyajikan laporan pendanaan mereka secara rinci, namun tidak untuk media mainstream. Penilai biasanya tidak meminta informasi lebih banyak dari media besar yang telah diverifikasi sebagai anggota sehingga IFCN mengubah bahasa dalam pedoman yang sebelumnya menjadi pernyataan umum mengenai anggaran secara menyeluruh, sumber pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan dari semua organisasi.

Selain itu, pemeriksa fakta tidak hanya sekedar mencantumkan daftar tim editorial saja tetapi juga dewan direksi, administrasi atau pihak yang membantu pekerjaan mereka dalam memeriksa fakta. Identitas pemeriksa fakta tidak boleh diambil dari akun media sosial sebagai bukti transparansi melainkan harus tercantum di situs web organisasi sehigga dapat diakses oleh publik.

Disarankan pada setiap akhir artikel pemeriksa fakta dicantumkan kolom komentar. Organisasi harus memutuskan cara seperti apa yang paling mudah bagi pembaca untuk menjangkaunya. Setiap organisasi setidaknya memberikan satu cara seperti penyediaan formulir dan alamat email di bagian akhir dari pemeriksa fakta serta menyediakan kolom komentar.

5. Komitmen terhadap Transparansi Metodologi

Penandatangan menjelaskan metodologi yang mereka gunakan di situs mereka untuk memilih, meneliti, menulis, mengedit, menerbitkan, dan memperbaiki pemeriksaan fakta mereka. Mereka mendorong pembaca untuk mengirim klaim untuk pemeriksaan fakta dan transparan tentang bagaimana mereka memeriksanya. Penandatangan memastikan menggunakan bukti yang relevan ketika melakukan pemeriksaan fakta. Perlunya standar penilaian ketika memilih sumber bukti yang akan digunakan sehingga jika ada sumber bukti yang berbeda namun menampilkan isi yang sama, penandatangan dapat dengan tegas menentukan sumber bukti mana yang dipilih. Penandatangan juga perlu mengetahui informasi mengenai pembuat klaim, minimal tahu di mana dapat mencari atau menghubungi mereka untuk mencari bukti pendukung. Penandatangan melibatkan khalayak untuk mengirimkan klaim yang ingin diperiksa kebenarannya. Selain itu, mereka yang mengirimkan klaim perlu juga menjelaskan apa yang diharapkan.

Berdasarkan laporan evaluasi tahun 2018, IFCN menemukan praktik terbaik yang pernah dilakukan adalam memanfaatkan penggunaan video

untuk menjelaskan proses kerja pemeriksa fakta. Pada prinsip ini sangat penting karena metodologi merupakan awal untuk pemeriksaan fakta, sehingga penilai tidak boleh lengah. Sejauh ini setiap anggota sudah mematuhi dengan baik dengan menjelaskan metodologi mereka yang dapat diakses oleh publik.

Beberapa organisasi pemeriksaaan fakta menggunakan aplikasi Whatsapp untuk publik mengirimkan klaim yang akan diperiksa faktanya. Namun tidak menutup kemungkinan menggunakan cara lain. IFCN menemukan klaim yang berasal dari pembaca sejauh ini merupakan sumber terbesar.

6. Komitmen terhadap Kebijakan Koreksi Terbuka dan Jujur

Penandatangan menerbitkan kebijakan koreksi mereka dan mengikutinya dengan cermat. Kebijakan koreksi tersebut harus mudah terlihat dan diakses di situs web organisasi. Mereka mengoreksi dengan jelas dan transparan sesuai dengan kebijakan koreksi, berusaha sejauh mungkin untuk memastikan bahwa pembaca melihat versi yang diperbaiki. Jika terjadi kesalahan, penandatangan harus membuat koreksi secara terbuka dan transparan, serta memastikan khalayak melihat koreksi dan versi yang sudah dikoreki. Penandatangan juga perlu menyatakan bahwa dirinya merupakan anggota dari IFCN. Khalayak juga perlu tahu jika terjadi kesalahan atau melanggar aturan IFCN maka mereka dapat memberitahu IFCN melalui tautan situs IFCN.

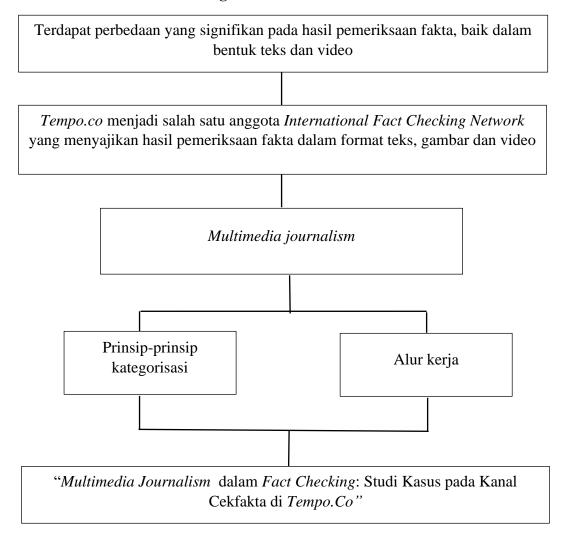
Berdasarkan laporan evaluasi tahun 2018, IFCN menerima beberapa laporan dari pembaca bahwa organisasi tidak memproses pengaduan

mereka. Seharusnya organisasi pemeriksaan fakta menyediakan layanan untuk pembaca mengirim hasil pengamatan atau keluhan, mereka juga perlu memberi penjalasan bahwa kontak yang tertera diperiksa setiap hari. Organisasi juga perlu menginformasikan tentang bagaimana mereka akan menindaklanjuti jika pembaca merasa tidak puas atau ingin mengkoreksi.

2.3 Alur Penelitian

Alexios Mantzarlis pada 2016 menemukan bahwa adanya perbedaan signifikan antara penyampaian hasil pemeriksaan fakta khususnya pada teks di media *online* dan video di televisi. Perbedaan tersebut menjadi menarik jika melakukan penelitian penyajian pemeriksaan fakta dalam bentuk video di media *online* karena belum dibahas dalam pernyataan tersebut. *Tempo.co* yang terdaftar sebagai anggota IFCN menjadi salah satu media *online* yang menghasilkan dua bentuk hasil pemeriksaan fakta, teks dan video sehingga peneliti berusaha untuk meneliti proses penyajian pemeriksaan fakta pada kanal Cek Fakta di *Tempo.co* menggunakan konsep *multimedia journalism*. Peneliti akan fokus terhadap prinsip-prinsip kategorisasi dan alur kerja yang dilakukan tim kanal Cek Fakta di *Tempo.co* dalam melakukan pemeriksaan fakta. Peneliti akan menggali informasi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan fakta di *Tempo.co*. Alur penelitian ini juga ditampilkan dalam Bagan 2.1.

Bagan 2.1 Alur Penelitian



Sumber: Olahan Peneliti, 2020